

Transformasi Representasi Arsip di Era Digital (Kajian Literatur 2015-2024)

Arvia Earwantama
Universitas Indonesia
arvia.earwantama41@ui.ac.id

Kartika Puspita Sari
Universitas Indonesia
kartika.puspita31@ui.ac.id

Meilani Mega Juita
Universitas Indonesia
meilani.mega@ui.ac.id

Nurul Habib Romadhan
Universitas Indonesia
nurul.habib@ui.ac.id

Taufik Asmiyanto
Universitas Indonesia
tasmiy@ui.ac.id

Abstrak

Periode 2015–2024 menandai lonjakan digitalisasi arsip dalam skala global. Namun, representasi arsip digital masih didominasi narasi institusional yang berisiko meminggirkan suara komunitas. Metode yang digunakan adalah *critical literature review* terhadap dua puluh artikel dalam *Archival Science* terbitan 2015–2024. Data dianalisis menggunakan matriks relevansi berdasarkan fokus studi, aktor dominan, subjek termarginalkan, bentuk representasi arsip, pendekatan partisipatif, diakhiri kritik dominasi institusi melalui pendekatan Foucault. Hasil kajian menunjukkan bahwa metadata dan sistem deskripsi arsip bekerja sebagai teknologi kuasa yang menyaring pengetahuan, mengesampingkan konteks komunitas lokal, dan menyederhanakan makna sosial. Subjek marginal seringkali dieksklusi dari narasi arsip digital melalui sistem otomasi yang bias. Meski demikian, sejumlah artikel menawarkan praktik resistensi melalui arsip komunitas dan model *postcustodial*. Hasil analisis menunjukkan representasi arsip masih didominasi institusi besar, sehingga diperlukan kebijakan metadata yang inklusif, partisipatif, dan adil secara sosial untuk mendorong keadilan representasi di era digital.

Kata kunci: arsip digital, post-strukturalis, representasi arsip.

Abstract

The period from 2015 to 2024 marked a significant surge in archival digitization on a global scale. However, digital archival representation remains dominated by institutional narratives, risking the marginalization of community voices. The study employs a critical literature review of twenty articles published in *Archival Science* between 2015 and 2024. Data were analyzed using a relevance matrix focusing on research themes, dominant actors, marginalized subjects, forms of archival representation, participatory approaches, and critiques of institutional power through a Foucauldian lens. The findings reveal that metadata and archival description systems function as technologies of power, filtering knowledge, disregarding local community contexts, and simplifying social meanings. Marginalized subjects are often excluded from digital archival narratives through biased automation systems. Nonetheless, several articles offer resistance practices through community archives and postcustodial models. The analysis reveals that archival representation is still dominated by major institutions, highlighting the need for inclusive, participatory, and socially just metadata policies to promote representational justice in the digital era.

Keywords: archival representation, digital archives, post-structuralism.

DOI:

© 2024 The Author(s). Published by (Institution). This is an open access article under the CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pada periode 2015-2024, digitalisasi arsip mengalami lonjakan besar yang didorong oleh kemajuan teknologi digital, yang mengubah cara kita mengelola, menyimpan, dan mengakses data arsip (Colavizza et al., 2022a). Digitalisasi memungkinkan arsip yang sebelumnya hanya bisa diakses dalam bentuk fisik untuk dipindahkan ke format digital, sehingga mempermudah akses informasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Implementasi *Encoded Archival Description* (EAD), menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa arsip-arsip tersebut dapat ditemukan dan diakses dengan mudah oleh pengguna (Pitti, 1999). Dengan menggunakan standar ini, arsip-arsip yang tersebar di berbagai lembaga di seluruh dunia dapat terhubung dan diakses dalam jaringan digital, meningkatkan kolaborasi antar lembaga arsip dan memudahkan penelitian global.

EAD adalah standar deskripsi arsip yang mengadopsi bahasa *markup* seperti XML dan SGML, yang memungkinkan arsip untuk dideskripsikan dalam format yang dapat dibaca mesin dan mudah diakses secara elektronik. EAD mendukung pengelolaan arsip dalam bentuk yang lebih terstruktur dan memungkinkan arsip untuk terhubung dengan data lain, melalui penggunaan *linked data*, yang memberikan kemampuan untuk menghubungkan data arsip dengan berbagai sumber daya digital lainnya (Pitti, 1999). Hal ini membuka jalan bagi lembaga-lembaga arsip untuk berbagi data dan mengintegrasikan koleksi mereka dalam platform yang lebih besar, memungkinkan pencarian dan navigasi arsip yang lebih efisien.

Penerapan kecerdasan buatan (AI) dalam arsip semakin berkembang, meskipun masih dalam tahap pengembangan. Penggunaan AI dalam arsip memungkinkan otomatisasi dalam pengolahan dan klasifikasi arsip, serta peningkatan efisiensi dalam pengindeksan dan pencarian arsip secara digital. Misalnya, lembaga seperti Library of Congress dan Arsip Nasional Inggris telah mulai mengintegrasikan AI dalam pengelolaan arsip mereka untuk mempercepat akses dan meningkatkan kualitas layanan (Paalman et al., 2021).

Meskipun digitalisasi arsip membawa banyak kemajuan, representasi arsip digital masih banyak dikendalikan oleh narasi lembaga negara dan korporasi besar. Lembaga-lembaga ini memiliki kontrol yang signifikan terhadap bagaimana arsip direpresentasikan, diakses, dan digunakan. Praktik ini berpotensi mengurangi keragaman perspektif dalam arsip digital, yang sering kali lebih mengutamakan kepentingan institusional daripada menyediakan akses yang inklusif dan representatif terhadap berbagai komunitas. Dalam konteks ini, munculnya gerakan untuk mengaktifkan arsip melalui kolaborasi komunitas dan pihak luar lembaga arsip menjadi sangat penting, mengingat

DOI:

© 2024 The Author(s). Published by (Institution). This is an open access article under the CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

bahwa pengelolaan arsip harus berorientasi pada kebutuhan sosial dan bukan hanya pada tujuan administratif atau komersial (Odumosu, 2020).

Digitalisasi arsip sering kali menghilangkan konteks komunitas asli karena metadata yang digunakan masih dipengaruhi oleh warisan kolonial dan perspektif institusional dominan. Metadata kolonial menyederhanakan makna sosial dan budaya arsip sehingga mengabaikan suara serta pengalaman komunitas asal (Carbajal, 2021). Akibatnya, narasi arsip menjadi bias dan memperkuat dominasi institusi atas sejarah, bukan mencerminkan keberagaman perspektif.

Metadata berfungsi sebagai teknologi kekuasaan yang mengontrol cara arsip direpresentasikan dan dipahami (Odumosu, 2020). Penelitian Carbajal (2021) menemukan bahwa banyak arsip sejarah yang dideskripsikan dengan metadata standar institusional menggunakan terminologi kolonial yang menghapus konteks budaya dan sosial komunitas asal. Sebagai contoh, arsip-arsip komunitas pribumi sering kali diberi label yang tidak akurat atau umum, sehingga menghilangkan makna asli dari dokumen tersebut. Odumosu (2020) menunjukkan bahwa metadata seperti ini memperkuat narasi dominan dan mengabaikan perspektif lokal. Kasus South Asian American Digital Archive (SAADA) membuktikan hal ini, dengan mereka mengembangkan sistem metadata yang melibatkan komunitas untuk mengembalikan konteks yang hilang.

Dalam kerangka post-strukturalis, Michel Foucault memandang metadata bukan sekadar alat teknis, melainkan teknologi kuasa yang beroperasi dalam rezim pengetahuan untuk membentuk dan mengendalikan akses terhadap informasi (Barker & A. Jane, 2016; Foucault, 1994). Metadata, yang diterapkan dalam pengelolaan arsip fisik maupun digital, bekerja secara halus untuk merepresentasikan sejarah dan identitas berdasarkan norma yang ditetapkan oleh aktor dominan. Proses klasifikasi, deskripsi, hingga pemilahan data membatasi siapa yang berhak melihat, menafsirkan, dan mengingat. Oleh karena itu, kritik terhadap netralitas metadata menjadi penting untuk membongkar bias kekuasaan yang tersembunyi di balik praktik representasi arsip modern.

Sejak akhir 1980-an, praktik kearsipan mulai bergeser melalui munculnya gerakan *postcustodial*. Pendekatan ini menolak dominasi institusional atas arsip fisik dan menekankan peran pencipta arsip dalam pengelolaan akses serta pelestariannya (Cook, 1994). Gerakan ini juga merupakan kritik terhadap praktik kolonial yang memindahkan arsip dari komunitas asal ke lembaga formal. Kesadaran ini mendorong munculnya arsip komunitas yang berbasis pada kontrol lokal dan representasi mandiri.

Memasuki awal 2000-an, pendekatan *participatory archives* memperluas gagasan tersebut dengan menekankan keterlibatan aktif komunitas dalam penciptaan, penafsiran, dan pengelolaan arsip (Huvila, 2008). Pendekatan ini

DOI:

© 2024 The Author(s). Published by (Institution). This is an open access article under the CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

menciptakan ruang kolaboratif yang terbuka terhadap keragaman perspektif sosial dan budaya. Contoh nyatanya adalah South Asian American Digital Archive (SAADA), yang sejak 2008 menjalin kemitraan dengan komunitas diaspora Asia Selatan di Amerika Serikat.

Seperti dijelaskan Caswell (2014), SAADA menjadikan arsip sebagai sarana pemberdayaan dan resistensi terhadap penghapusan sejarah kelompok marginal. Untuk menelusuri dinamika tersebut, penelitian ini melakukan *critical literature review* dengan lensa post-strukturalis. Masing-masing dua artikel dari Jurnal Arcival Archive tahun 2015-2024 dipilih lalu dianalisis kesesuaiannya dengan pertanyaan penelitian melalui matriks relevansi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji transformasi representasi arsip di era digital dengan menyoroti dominasi institusi dan kritik partisipatif dalam kerangka post-strukturalis Michel Foucault sehingga studi ini mampu mendeskripsikan transformasi dan dinamika dalam representasi arsip modern.

Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini membahas bagaimana dominasi narasi institusional dalam representasi arsip digital dikritik melalui pendekatan partisipatif dan digital dalam kerangka pemikiran Michel Foucault.

Kerangka Pemikiran

Representasi arsip merupakan konsep fundamental dalam praktik dalam menyampaikan makna serta informasi yang terkandung dalam dokumen arsip kepada pengguna, lalu diwujudkan dengan instrumen seperti *finding aids*. Di era digital, informasi tersebut disajikan dalam bentuk memadat yang mengikuti standar deskripsi tertentu seperti, Encoded Archival Description (EAD), yaitu penyusunan struktur deskriptif arsip secara hierarkis (Pitti, 1999). Serta pendekatan pembentukan hubungan semantik antara arsip dan berbagai entitas lain berbasis linked data (Dobreski et al., 2019).

Colavizza et al. (2022) menyebutkan dengan memanfaatkan Artificial Intelligent (AI) mampu membuka peluang baru namun juga membawa risiko pembiasan narasi jika tidak melibatkan kritik etik dan partisipatif. Namun pada praktik kearsipan deskripsi tidak hanya berfungsi sebagai alat temu kembali informasi, melainkan juga sebagai medium pembentuk makna historis yang dipengaruhi oleh pemilihan bahasa, kategori, dan konteks penyusunan deskripsi tersebut (Rawson, 2018; Cook dan Schwartz dalam Rawson, 2018). Peran arsip komunitas menjadi penting untuk menyeimbangkan persepsi aktor dominan akibat dari relasi kuasa (Giemza, 2017).

Post-strukturalisme menolak gagasan bahwa makna arsip bersifat tetap dan objektif. Derrida menyatakan bahwa metadata dan deskripsi arsip merupakan konstruksi representasional yang membentuk “kebenaran arsip”, bukan sekadar pencerminan masa lalu (Royle, 2003). Foucault menekankan

DOI:

© 2024 The Author(s). Published by (Institution). This is an open access article under the CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

bahwa arsip adalah bagian dari rezim pengetahuan, di mana metadata menjadi teknologi kuasa yang menentukan siapa yang dapat mengakses pengetahuan dan bagaimana ia dibingkai (Barker & A. Jane, 2016; Foucault, 1994).

Bourdieu melihat katalogisasi sebagai bentuk klasifikasi sosial yang mencerminkan habitus dan posisi sosial pembuatnya (Grenfell, 2008). Lyotard menambahkan bahwa di era informasi, sistem metadata dan AI menjadi alat legitimasi baru yang sering kali mereproduksi wacana dominan seperti kolonialisme dan patriarki (Lyotard, 1984). Deskripsi arsip, sebagai praktik semiosis, tidak netral dan sarat ideologi (Nöth, 1990; Royle, 2003). Karena itu, pendekatan post-strukturalis membuka ruang untuk reinterpretasi dan deskripsi partisipatif dalam upaya dekolonisasi arsip.

Perubahan paradigma dari *custodial* ke *postcustodial* menandai pergeseran kekuasaan dari lembaga arsip ke komunitas pengguna. Dalam paradigma *postcustodial*, arsip tidak lagi dipandang sebagai benda yang “disimpan oleh otoritas”, tetapi sebagai konstruksi sosial dan produk kolaborasi. Peneliti seperti Caswell et al. (2016) dan Yakel (2003) menegaskan bahwa deskripsi arsip adalah tindakan representasional yang membentuk makna dan identitas. Konsep *participatory archives* dan *representational belonging* (Cifor & Gilliland, 2016) memberi ruang bagi masyarakat untuk berkontribusi langsung dalam menentukan cara arsip direpresentasikan. Contoh praktik ini terlihat pada SAADA yang melibatkan komunitas diaspora Asia Selatan dalam membentuk narasi mereka sendiri.

Transformasi representasi arsip menjadi lebih dinamis dapat dianalisis melalui Records Continuum Model (RCM). RCM menekankan bahwa arsip tidak bersifat statis, tetapi selalu berada dalam proses pembentukan makna (*state of becoming*) (Colavizza et al., 2022b). Melalui prinsip pluralisasi, RCM membuka ruang untuk representasi yang inklusif, tidak hanya dari sisi lembaga, tetapi juga komunitas yang terdampak. Dengan mengintegrasikan teknologi digital secara kritis dan prinsip partisipatif, representasi arsip menjadi medan demokratisasi memori, bukan sekadar alat dokumentasi. Beberapa penelitian terdahulu telah membahas topik representasi arsip, namun masih banyak yang berfokus pada penguatan sistem deskripsi berbasis teknologi atau efisiensi akses. Serta kajian yang membahas aspek kritik ideologis dalam konteks digital masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi celah dengan fokus pada bagaimana narasi institusional dalam arsip digital dapat dikritik melalui pendekatan partisipatif dan kolaboratif.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan *critical literature review* dengan landasan pemikiran post-strukturalis Michel Foucault. *Critical literature review* dipilih karena selaras dengan tujuan penelitian yaitu mengkritisi produksi,

DOI:

© 2024 The Author(s). Published by (Institution). This is an open access article under the CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

penyebaran, dan dominasi (Boell & Cecez-Kecmanovic, 2015) terkait transformasi representasi arsip di era digital. Sebagaimana Foucault (1972) memandang bahwa pengetahuan adalah sesuatu yang berhubungan dengan kekuasaan, bahasa, dan sosial. Maka pengetahuan tidak murni netral ataupun objektif, namun dipengaruhi oleh konteks bagaimana penciptaan pengetahuan itu sendiri. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat narasi representasi arsip yang dibentuk oleh narasi besar dan bagaimana respons dari kelompok minoritas terhadap dominasi tersebut.

Sumber data yang dipilih secara purposif yaitu masing-masing dua artikel yang terbit dari tahun 2015-2024 pada jurnal *Archival Science*. Pemilihan artikel berdasarkan topik membahas representasi arsip digital, metadata, partisipasi komunitas, etika deskripsi, atau bias institusional (termasuk review dan studi kasus). Analisis temuan dituangkan dalam matriks yang berisi fokus studi, aktor dominan, kelompok termarginalkan, bentuk representasi arsip, pendekatan partisipatif, dan diakhiri dengan kritik dominasi institusi melalui pendekatan Foucault.

PEMBAHASAN

Netralitas dan Desentralisasi Otoritas Representasi Arsip

Berdasarkan pemikiran Foucault, terkait *regime of truth* yakni wacana besar diproduksi oleh institusional dan menyampingkan wacana alternatif dari komunitas atau individu. Tujuh belas artikel menunjukkan bahwa deskripsi yang tidak netral bersumber dari dominasi negara (kontrol politik), perusahaan (komersialisasi narasi), akademisi (narasi epistemik), dan institusi kolonial (penyingkiran narasi adat atau lokal) dalam mengontrol deskripsi arsip. Hal ini berdampak pada kesenjangan kelengkapan narasi arsip, yang mana seharusnya bisa memberikan pengetahuan yang bisa diperluas oleh masyarakat (Borgerud & Borglund, 2020; Dallas, 2016; Feng et al., 2021; Fresa et al., 2015; Frings-Hessami, 2022; Guberek & Hedstrom, 2017; Hering, 2023; Jarvie et al., 2021; Jeurgens & Karabinos, 2020; Marsh, 2023; Marsh et al., 2016; Martínez-Cardama & Pacios, 2022; Pearson et al., 2024; Poole, 2015; Rayan, 2024; Vukliš, 2017). Maka diperlukan intervensi partisipatif sebagai bentuk *counter discourse* sehingga membuka wacana alternatif. Seperti menerapkan prinsip *participatory description* dan melibatkan komunitas arsip sebagai *co-curation* atau *co-describer*.

Kemampuan komunitas mendefinisikan dan menghidupkan ruang arsip mereka sendiri, menjadi ruang intergenerasional dan politis yang dibentuk dari bawah (*bottom-up*), bukan dari institusi (Caswell et al., 2018). Sehingga mewujudkan representasi arsip berupa ruang komunitas yang tidak hanya menyimpan dokumen, tetapi juga berfungsi sebagai ruang publik untuk menumbuhkan kesadaran budaya, memperkuat identitas kolektif, ruang dekolonial yang dikontrol oleh komunitas adat itu sendiri (Lian & Oliver, 2018;

DOI:

© 2024 The Author(s). Published by (Institution). This is an open access article under the CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

McKemmish et al., 2019). Karena komunitas kearsipan juga bisa sebagai sarana peluang bagi individu untuk mendonasikan arsip mereka sehingga mampu mengembangkan narasi sebagai bentuk penciptaan memori kolektif yang berasal dari pengalaman personal (Roeschley & Kim, 2019).

Metadata dan Keadilan Representasi Arsip

Berdasarkan pemikiran Foucault mengenai *regime of truth*, di mana wacana besar diproduksi oleh institusi yang berkuasa, kita menemukan bahwa penggunaan metadata standar dalam pengelolaan arsip sering kali menghasilkan bias yang menguntungkan kelompok atau institusi tertentu. Bias ini bisa berupa bias kolonial, gender, atau institusional yang tercermin dalam deskripsi metadata yang tidak adil atau terbatas. Dalam konteks ini, metadata yang dihasilkan oleh sistem informasi arsip yang berstandar cenderung memihak kepada perspektif yang dominan—baik itu negara, perusahaan, atau institusi—institusi yang memiliki kekuasaan untuk menentukan kategori dan penamaan arsip. Hal ini memperburuk ketidaksetaraan dalam representasi arsip, mengurangi ruang bagi narasi alternatif dari komunitas atau individu yang terpinggirkan. Bias tersebut memengaruhi bagaimana pengetahuan, sejarah, dan identitas dikonstruksi dan dipertahankan dalam arsip (Borgerud & Borglund, 2020; Dallas, 2016; Feng et al., 2021).

Pendekatan *postcustodial* menekankan bahwa pengelolaan arsip tidak hanya menjadi tanggung jawab institusi formal seperti arsip negara atau perusahaan, tetapi juga memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dan komunitas dalam proses pengelolaan arsip. Foucault menekankan bahwa arsip bukan hanya sekedar tempat penyimpanan informasi, tetapi juga ruang di mana narasi dibentuk, didiskusikan, dan dipertahankan oleh kekuasaan (Foucault, 1972). Dengan pendekatan *postcustodial*, arsip tidak lagi hanya dikendalikan oleh pihak yang berkuasa untuk merepresentasikan kebenaran sesuai dengan kepentingan mereka. Sebaliknya, arsip menjadi ruang yang lebih terbuka, di mana berbagai narasi bisa ada dan saling berinteraksi, termasuk suara-suara yang selama ini terpinggirkan.

Dalam hal ini, pengembang sistem informasi dan arsiparis memiliki peran penting untuk merancang metadata yang inklusif dan dinamis, yang mencakup representasi yang lebih adil dari berbagai kelompok. Dengan penerapan prinsip deskripsi partisipatif, seperti yang diusulkan oleh Caswell et al. (2018), metadata bisa menjadi alat yang memungkinkan komunitas terlibat langsung dalam penentuan cara arsip mereka dideskripsikan dan dikategorikan. Hal ini sejalan dengan prinsip *postcustodial* yang menekankan bahwa arsip seharusnya bukan hanya tempat menyimpan data yang dimiliki oleh institusi, tetapi juga ruang yang mengakomodasi representasi arsip dari berbagai pihak, terutama yang berasal dari komunitas yang sebelumnya terpinggirkan. Oleh karena itu,

DOI:

© 2024 The Author(s). Published by (Institution). This is an open access article under the CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

metadata yang inklusif tidak hanya berfungsi sebagai catatan teknis, tetapi juga memungkinkan pembentukan narasi yang lebih holistik dan memperkaya pengetahuan bersama.

Untuk mengatasi bias yang ada, pengembang sistem informasi dan arsiparis perlu merancang metadata yang lebih fleksibel, responsif terhadap perubahan sosial dan budaya, serta mampu mencerminkan berbagai perspektif. Prinsip *postcustodial* menuntut agar metadata tidak hanya mencatat data teknis, tetapi juga memberikan suara kepada komunitas yang memiliki arsip tersebut, sehingga mereka bisa turut mendefinisikan bagaimana arsip mereka akan diinterpretasikan dan digunakan. Dengan demikian, metadata yang inklusif dan dinamis dapat menciptakan ruang arsip yang lebih representatif dan adil, serta mendukung terciptanya arsip sebagai ruang publik yang memperkuat identitas kolektif dan kesadaran budaya (Lian & Oliver, 2018; McKemmish et al., 2019).

Kritik terhadap Otomasi

Dalam kerangka pemikiran post-strukturalis Michel Foucault, sistem metadata dan otomasi dalam arsip digital tidak hanya berfungsi sebagai alat teknis, tetapi merupakan bagian dari *regime of truth*, yaitu struktur kuasa yang menentukan bagaimana pengetahuan diproduksi, diklasifikasikan, dan diakses. Dari dua puluh artikel yang dianalisis, muncul pola kritik terhadap cara sistem digital, baik dalam bentuk perangkat lunak, prosedur kurasi, maupun model metadata, telah menggantikan peran aktor manusia dengan struktur otomatis yang rigid, sehingga mempersempit ruang negosiasi makna arsip.

Beberapa studi menunjukkan bahwa otomasi dalam pengelolaan arsip cenderung menempatkan efisiensi sebagai nilai utama, tanpa mempertimbangkan keragaman konteks sosial dan historis. Fresa et al. (2015) menyoroti penggunaan perangkat lunak validasi digital berbasis standar Eropa yang menjamin interoperabilitas teknis tetapi mengabaikan praktik lokal dan nilai-nilai komunitas asal arsip. Poole (2015) mempermasalahkan kurasi digital yang terlalu menekankan struktur formal dan sistematis, sementara mengabaikan infrastruktur manusia dan nuansa afektif dalam pengelolaan arsip. Dallas (2016) juga mencatat bahwa pendekatan normatif terhadap digitalisasi arsip menyederhanakan kompleksitas sosial ke dalam format data yang statis, yang pada akhirnya melanggengkan narasi dominan.

Kritik ini semakin kuat ketika ditinjau dari bagaimana subjek-subjek marginal, seperti imigran, penyintas kolonialisme, penyandang disabilitas, warga Palestina, masyarakat adat, komunitas lokal, korban kekerasan negara, aktivis hak hewan (Jarvie et al., 2021), bahkan arsiparis itu sendiri (Borgerud & Borglund, 2020; Frings-Hessami, 2022), dihapuskan atau disederhanakan dalam sistem otomasi arsip. Guberek & Hedstrom (2017) menunjukkan dominasi

DOI:

© 2024 The Author(s). Published by (Institution). This is an open access article under the CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

negara dalam produksi arsip menghasilkan penghilangan sistematis terhadap kekerasan melalui pilihan istilah, sensor internal, dan pengalihan data.

Pearson et al. (2024) menunjukkan bahwa penyandang disabilitas sering kali direpresentasikan melalui pendekatan medis yang tidak kontekstual dan paternalistik. Rayan (2024) menyatakan bahwa narasi Palestina telah dihapus dari arsip resmi dan digantikan oleh konstruksi negara dominan, yang menunjukkan bagaimana sistem representasi yang terotomatisasi dapat menjadi alat penghilangan sejarah. Begitu pula Jeurgens & Karabinos (2020) & Marsh (2023) menyoroti bagaimana arsip kolonial tetap menggunakan metadata warisan kolonial tanpa mempertimbangkan rekonseptualisasi dari perspektif masyarakat adat atau eks-koloni.

Dalam semua kasus ini, sistem otomatis beroperasi tidak hanya sebagai alat teknis, melainkan sebagai mekanisme eksklusi struktural. Metadata yang tampak objektif sebenarnya sarat dengan nilai ideologis: siapa yang dideskripsikan, dengan istilah apa, dan untuk kepentingan siapa. Otomasi mempercepat proses ini tanpa memberikan ruang kritik atau partisipasi dari komunitas yang terdampak.

Sebagai bentuk perlawanan terhadap hal tersebut, beberapa artikel menyerukan rekomendasi pentingnya pendekatan representasi arsip dan metadata yang lebih dinamis dan inklusif, yang memungkinkan ruang untuk multivokalitas, partisipatif, dan intervensi komunitas. Dallas (2016) menyarankan agar metadata tidak hanya dirancang berdasarkan efisiensi, tetapi juga memperhatikan praktik kultural. Caswell et al. (2018); Marsh (2023); McKemmish et al. (2019); Vukliš (2017) menunjukkan pentingnya narasi personal, pengalaman komunitas, dan representasi emosional sebagai bagian dari sistem arsip digital. Feng et al. (2021) menekankan perlunya melibatkan komunitas dalam pemaknaan arsip digital agar praktik representasi tidak lagi didikte oleh lembaga pusat. Pendekatan ini menyerukan agar otomasi tetap dalam kerangka yang diawasi oleh manusia dan ditopang prinsip keadilan representasional.

Dengan demikian pemikiran Foucault dalam kerangka post-strukturalis membantu menyingkap bahwa sistem otomasi bukanlah perangkat netral, melainkan medium kuasa yang menyaring, menyusun, dan mengatur akses atas masa lalu. Kritik terhadap otomasi dalam studi-studi ini memperjelas bahwa transformasi digital dalam arsip tidak boleh hanya mengutamakan kecepatan dan efisiensi, tetapi juga harus memperjuangkan inklusivitas, partisipasi, dan keberagaman makna.

Penguatan Arsip Komunitas dan Model *Postcustodial*

Arsip komunitas muncul sebagai bentuk perlawanan terhadap cara kerja lembaga formal yang selama ini mendominasi proses pengarsipan. Dalam

DOI:

© 2024 The Author(s). Published by (Institution). This is an open access article under the CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

banyak kasus, komunitas seperti masyarakat adat, diaspora, penyintas kekerasan negara, dan kelompok marginal lainnya tidak dilibatkan dalam proses pengelolaan arsip yang menyangkut mereka sendiri. Dari enam belas artikel yang dianalisis, terlihat bahwa representasi mereka sering kali disisihkan oleh sistem deskripsi yang ditentukan oleh negara, lembaga arsip nasional, perusahaan digital, atau akademisi (Dallas, 2016; Jeurgens & Karabinos, 2020; Marsh, 2023; Pearson et al., 2024; Poole, 2015). Selain tidak diakui secara hukum, arsip komunitas juga jarang dianggap sah sebagai bagian dari narasi sejarah resmi (Guberek & Hedstrom, 2017; Rayan, 2024). Bahkan ketika komunitas menjadi subjek utama dari arsip tersebut, mereka tetap tidak diberi peran dalam proses kurasi dan penjelasan (Feng et al., 2021; Marsh et al., 2016). Metadata dan sistem klasifikasi yang digunakan sering tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya atau identitas sosial mereka (Hering, 2023; Vukliš, 2017), sehingga mempersempit cara komunitas memaknai pengalaman kolektif mereka.

Untuk mengatasi hal ini, beberapa penelitian mendorong penggunaan pendekatan *postcustodial*, yaitu pendekatan yang lebih terbuka dan kolaboratif antara lembaga arsip dan komunitas. Model ini memberi ruang bagi komunitas untuk ikut menentukan, menjelaskan, dan merawat arsip mereka sendiri, bukan hanya menjadi objek yang diarsipkan. Studi-studi seperti Caswell et al. (2016); McKemmish et al. (2019); Roeschley & Kim (2019) serta Giemza (2017) menunjukkan bahwa keterlibatan komunitas dalam proses pengarsipan bisa memperkaya narasi dan memperkuat rasa kepemilikan. Supaya hal ini berjalan efektif, dibutuhkan dukungan berupa penguatan literasi arsip, penyediaan teknologi yang mudah diakses, serta kebijakan metadata yang lebih fleksibel (Borgerud & Borglund, 2020; Fresa et al., 2015; Lian & Oliver, 2018). Jika lembaga arsip mau mengubah peran dari pengendali menjadi mitra, maka arsip komunitas bisa berkembang sebagai ruang penyimpanan pengetahuan yang hidup, kontekstual, dan relevan bagi identitas kolektif masyarakat itu sendiri.

SIMPULAN

Hasil analisis terhadap dua puluh artikel jurnal Archival Science menunjukkan bahwa representasi arsip masih didominasi oleh institusi besar seperti lembaga negara, perusahaan, dan arsip kolonial. Hal ini tercermin pada enam belas artikel yang memperlihatkan bahwa deskripsi tidak memberi ruang bagi narasi komunitas adat maupun lokal. Namun pada tahun 2018 & 2019 menunjukkan ada resistensi melalui praktik komunitas arsip dan pendekatan kolaboratif. Dalam hal ini perlu strategi pembentukan metadata yang inklusif dan partisipatif sehingga mampu mendorong keadilan representasi. Selain itu, otomasi juga dikritisi karena terdapat bias kolonialisme, patriarki, dan pemikiran lama. Maka diperlukan kebijakan otomasi yang diharapkan mampu memperluas partisipasi, bukan sekedar agen sosial.

DOI:

© 2024 The Author(s). Published by (Institution). This is an open access article under the CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Oleh karena itu, representasi di era digital perlu mendorong transformasi peran lembaga kearsipan atau institusi besar dari pengendali menjadi mitra komunitas arsip dengan dukungan kebijakan, literasi, dan teknologi. Berkaca dari narasi Foucault, pengelolaan arsip bukan hanya tentang dokumentasi yang baik, namun juga ada agenda diskusi terkait kebenaran makna dan distribusi kuasa secara adil. Sehingga deskripsi arsip mampu membuka ruang wacana, di mana komunitas memiliki hak berpendapat dan menentukan makna.

REFERENSI

- Barker, C., & A. Jane, E. (2016). *CULTURAL STUDIES*.
- Boell, S. K., & Cecez-Kecmanovic, D. (2015). On being “systematic” in literature reviews in IS. *Journal of Information Technology*, 30(2), 161–173. <https://doi.org/10.1057/JIT.2014.26>
- Borgerud, C., & Borglund, E. (2020). Open research data, an archival challenge? *Archival Science*, 20(3), 279–302. <https://doi.org/10.1007/s10502-020-09330-3>
- Carbajal, I. A. (2021). Historical Metadata Debt: Confronting Colonial and Racist Legacies Through a Post-Custodial Metadata Praxis. *Across the Disciplines*, 18(1–2), 91–107. <https://doi.org/10.37514/atd-j.2021.18.1-2.08>
- Caswell, M. (2014). Toward a survivor-centered approach to records documenting human rights abuse: lessons from community archives. *Archival Science*, 14(3–4), 307–322. <https://doi.org/10.1007/s10502-014-9220-6>
- Caswell, M., Cifor, M., & Ramirez, M. H. (2016). “to Suddenly Discover Yourself Existing”: Uncovering the Impact of Community Archives 1. *American Archivist*, 79(1), 56–81. <https://doi.org/10.17723/0360-9081.79.1.56>
- Caswell, M., Gabiola, J., Zavala, J., Brilmyer, G., & Cifor, M. (2018). Imagining transformative spaces: the personal–political sites of community archives. *Archival Science*, 18(1), 73–93. <https://doi.org/10.1007/s10502-018-9286-7>
- Cifor, M., & Gilliland, A. J. (2016). Affect and the archive, archives and their affects: an introduction to the special issue. *Archival Science*, 16(1), 1–6. <https://doi.org/10.1007/S10502-015-9263-3>
- Colavizza, G., Blanke, T., Jeurgens, C., & Noordegraaf, J. (2022a). Archives and AI: An Overview of Current Debates and Future Perspectives. *Journal on Computing and Cultural Heritage*, 15(1). <https://doi.org/10.1145/3479010/ASSET/454FA412-DE17-47A5-B4B0-EE5ACB3E6ED0/ASSETS/GRAPHIC/JOCCH1501-04-F01.JPG>
- Colavizza, G., Blanke, T., Jeurgens, C., & Noordegraaf, J. (2022b). Archives and AI: An Overview of Current Debates and Future Perspectives. *Journal on Computing and Cultural Heritage*, 15(1). <https://doi.org/10.1145/3479010>
- Cook, T. (1994). *Electronic Records, Paper Minds: The revolution in information management and archives in the post-custodial and post-modernist era*.
- Dallas, C. (2016). Digital curation beyond the “wild frontier”: a pragmatic approach. *Archival Science*, 16(4), 421–457. <https://doi.org/10.1007/s10502-015-9252-6>
- Dobreski, B., Park, J., Leathers, A., & Qin, J. (2019). *Remodeling Archival Metadata Descriptions for Linked Archives*. <https://doi.org/10.23106/dcmi.952141553>

DOI:

© 2024 The Author(s). Published by (Institution). This is an open access article under the CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

- Feng, H., Lian, Z., Pan, W., Qu, C., Zhou, W., Wang, N., & Li, M. (2021). Retrospect and prospect: the research landscape of archival studies. *Archival Science*, 21(4), 391–411. <https://doi.org/10.1007/s10502-021-09364-1>
- Foucault, M. (1972). *The Archaeology of Knowledge*.
- Foucault, M. (1994). *The Order of Things*.
- Fresa, A., Justrell, B., & Prandoni, C. (2015). Digital curation and quality standards for memory institutions: PREFORMA research project. *Archival Science*, 15(2), 191–216. <https://doi.org/10.1007/s10502-015-9242-8>
- Frings-Hessami, V. (2022). Continuum, continuity, continuum actions: reflection on the meaning of a continuum perspective and on its compatibility with a life cycle framework. *Archival Science*, 22(1), 113–128. <https://doi.org/10.1007/s10502-021-09371-2>
- Giemza, B. (2017). More than words: Respectful stewardship and the balance of community archives. *Letonica*, 36, 32–43.
- Grenfell, M. (2008). *Pierre Bourdieu Key Concepts*.
- Guberek, T., & Hedstrom, M. (2017). On or off the record? Detecting patterns of silence about death in Guatemala's National Police Archive. *Archival Science*, 17(1), 27–54. <https://doi.org/10.1007/s10502-017-9274-3>
- Hering, K. (2023). The representation of NARA's INS records in Ancestry's database portal. *Archival Science*, 23(1), 29–44. <https://doi.org/10.1007/s10502-022-09386-3>
- Huvila, I. (2008). Participatory archive: Towards decentralised curation, radical user orientation, and broader contextualisation of records management. *Archival Science*, 8(1), 15–36. <https://doi.org/10.1007/s10502-008-9071-0>
- Jarvie, K., Evans, J., & McKemmish, S. (2021). Radical appraisal in support of archival autonomy for animal rights activism. *Archival Science*, 21(4), 353–372. <https://doi.org/10.1007/s10502-021-09362-3>
- Jeurgens, C., & Karabinos, M. (2020). Paradoxes of curating colonial memory. *Archival Science*, 20(3), 199–220. <https://doi.org/10.1007/s10502-020-09334-z>
- Lian, Z., & Oliver, G. (2018). Sustainability of independent community archives in China: a case study. *Archival Science*, 18(4), 313–332. <https://doi.org/10.1007/s10502-018-9297-4>
- Lyotard, J.-F. (1984). *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge (Vol. 10)*.
- Marsh, D. E. (2023). Digital knowledge sharing: perspectives on use, impacts, risks, and best practices according to Native American and Indigenous community-based researchers. *Archival Science*, 23(1), 81–115. <https://doi.org/10.1007/s10502-021-09378-9>
- Marsh, D. E., Punzalan, R. L., Leopold, R., Butler, B., & Petrozzi, M. (2016). Stories of impact: the role of narrative in understanding the value and impact of digital collections. *Archival Science*, 16(4), 327–372. <https://doi.org/10.1007/s10502-015-9253-5>
- Martínez-Cardama, S., & Pacios, A. R. (2022). National archives' priorities: an international overview. *Archival Science*, 22(1). <https://doi.org/10.1007/s10502-021-09367-y>

DOI:

© 2024 The Author(s). Published by (Institution). This is an open access article under the CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

- McKemmish, S., Chandler, T., & Faulkhead, S. (2019). Imagine: A living archive of people and place “somewhere beyond custody.” *Archives in a Changing Climate - Part I & Part II*, 73–93. <https://doi.org/10.1007/s10502-019-09320-0>
- Nöth, W. (1990). *Handbook of Semiotics*.
- Odumosu, T. (2020). The crying child: On colonial archives, digitization, and ethics of care in the cultural commons. *Current Anthropology*, 61(S22), 289–302. <https://doi.org/10.1086/710062/ASSET/IMAGES/LARGE/FG9.JPEG>
- Paalman, F. ;, Fossati, G. ;, & Masson, E. (2021). *Introduction: Activating the Archive*. <https://doi.org/10.5749/movingimage.21.1-2.0001>
- Pearson, A., Griffith, M., Rakoska, B., Harrison, C., Schuitema, K., & Taşcıoğlu, E. (2024). Breaking out of the box: increasing the representation of disability within archive science. *Archival Science*, 24(1), 101–118. <https://doi.org/10.1007/s10502-023-09429-3>
- Pitti, D. V. (1999). Encoded Archival Description: an introduction and overview. *New Review of Information Networking*, 5, 61–69. <https://doi.org/10.1080/13614579909516936>
- Poole, A. H. (2015). How has your science data grown? Digital curation and the human factor: a critical literature review. *Archival Science*, 15(2), 101–139. <https://doi.org/10.1007/s10502-014-9236-y>
- Rawson, K. J. (2018). The Rhetorical Power of Archival Description: Classifying Images of Gender Transgression. *Rhetoric Society Quarterly*, 48(4), 327–351. <https://doi.org/10.1080/02773945.2017.1347951>
- Rayan, T. N. (2024). Transformative provenance: memory work in the Palestinian diaspora. *Archival Science*. <https://doi.org/10.1007/s10502-024-09455-9>
- Roeschley, A., & Kim, J. (2019). “Something that feels like a community”: the role of personal stories in building community-based participatory archives. *Archival Science*, 19(1), 27–49. <https://doi.org/10.1007/s10502-019-09302-2>
- Royle, N. (2003). *Jacques Derrida*.
- Vukliš, V. (2017). Writing social history of socialist Yugoslavia: the archival perspective. *Archival Science*, 17(1), 55–77. <https://doi.org/10.1007/s10502-016-9269-5>
- Yakel, E. (2003). Archival Representation. *Archival Science*, 3, 1–25.

DOI:

© 2024 The Author(s). Published by (Institution). This is an open access article under the CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)